

**KEJAHATAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK PERTANIAN LOKAL DALAM PASAR BEBAS**

Ika Riswanti Putranti  
Satwika Paramasatya  
Email: [ikarisp@gmail.com](mailto:ikarisp@gmail.com)  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

**Abstrak**

*Free trade zone established under international treaty instrument provides the facility specifically applies only to member States. Main facilities provided under such agreement covering reduction or even elimination of tariff barriers aimed to increase trade between members, yet it is vulnerable to trade crimes committed by third parties in order to take benefits. Origin fraud known as one of international trade crime that causes an injury for beneficiary countries. Regulatory instruments under international, regional, national, and regional dimensions, which aimed to prevent or to minimize the trade crimes become indispensable tools to avoid the losses of local producers.*

**PENDAHULUAN****1. Posisi produk pertanian lokal dalam konstruksi perdagangan bebas.**

Produk pertanian merupakan salah satu produk utama bagi tulang punggung suatu negara. Indonesia sebagai negara agraris mempunyai banyak keuntungan dari sisi geografis dimana terletak iklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan, sehingga memungkinkan sebagian besar jenis tanaman dan hewan ternak bisa tumbuh dan berkembang biak.<sup>1</sup> Disisi sumber daya manusia hampir lebih dari 50% penduduk Indonesia mata pencaharian pokoknya adalah

usaha tani. Berdasarkan data BPS jumlah Rumah Tangga Usaha Tani (RTUT) pada tahun 2013 sebanyak 26,13 juta RT.

Dengan asumsi, jika tiap-tiap RTUT memiliki 3 anak saja, maka jumlah penduduk yang mengantungkan hidupnya pada sektor usaha tani mencapai sekitar 130,6 juta orang atau sekitar 56,8 persen (asumsi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 230 juta orang).<sup>2</sup> Hal ini belum ditambah dengan jumlah pelaku usaha dan pekerja yang bergerak di industri hilir bidang pertanian yang tentunya efek ekonominya akan signifikan bagi penduduk Indonesia yang sebagian besar masih bermukim di daerah pedesaan. Potensi strategis pertanian dalam perekonomian Indonesia semesti menjadi

<sup>1</sup> Andajani, Tatiek K, dan Dwiastuti, Rini, Pengantar Ekonomi Pertanian : Peranan Pertanian dalam Sistem Perekonomian Indonesia.

<sup>2</sup> Ibid

salah satu daya ungkit untuk meningkatkan daya saing produktivitas ekspor dibidang non migas.

Memasuki pasar bebas ASEAN 2015 sektor pasar dibidang pertanian khususnya sektor pangan akan menjadi sangat lucrative bagi para pelaku usaha di ASEAN. Indonesia dengan jumlah penduduk paling besar di ASEAN memiliki pangsa pasar yang besar bagi produk pertanian. Tidak dapat dipungkiri meskipun dengan berbagai keunggulan sisi geografis, sumber daya alam, dan sumber daya manusia, namun Indonesia masih mengalami kekurangan untuk memenuhi suplai domestik produk pertanian. Disisi lain AEC (ASEAN Economic Community) membuka pasar luas bagi produk pertanian lokal untuk dapat masuk kedalam pasar ASEAN tanpa hambatan tarif.

Sebuah produk untuk mendapatkan fasilitas dibawah FTA harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan baik dari sisi kualitas produk, proses produksi, sampai dengan kelengkapan administrasi. Tujuan utama dari FTA dibuat adalah untuk meningkatkan perdagangan dalam wilayah (intra-region), dan meningkatkan daya saing wilayah di pasar global. Sehingga FTA ditujukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara-negara anggota dan ini seharusnya juga berkorelasi dengan peningkatan pendapat maupun taraf hidup bagi para produsen produk lokal, pekerja dan pelaku sektor terkait.

Produk pertanian merupakan salah satu komoditi yang mendapat tempat istimewa di bawah AEC karena pangsa pasar regional yang relative besar dan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Kejahatan perdagangan international terhadap produk pertanian lokal merugikan petani dan produsen lokal pertanian secara tidak langsung. Mengurangi margin keuntungan yang seharusnya diperoleh petani lokal dan produsen lokal sampai dengan mematikan industri hilir bidang pertanian.

Sehingga bagaimana perangkat hukum terkait dengan perdagangan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan perdagangan international dalam pasar bebas menjadi hal yang sangat urgent untuk dianalisa

dan dipetakan. Dengan demikian pihak yang terkait baik pelaku usaha, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan dapat mengakses perangkat hukum tersebut guna menghindari terjadinya kerugian akibat kejahatan international atas produk mereka.

## **2. Traceability**

Traceability produk pertanian, khususnya untuk tanaman bahan pangan merupakan salah satu unsur penting dalam menjamin kualitas dan keamanan product yang dikonsumsi konsumen. Traceability produk mencakup proses dari produksi sampai distribusi, dimana produk berasal dan kemana produk akan didistribusikan. Sehingga wajib bagi produsen untuk memberikan identifikasi unik terhadap setiap bahan atau material yang digunakan dalam produksi sehingga mempermudah identifikasi komponen produk bagi user ataupun konsumen.<sup>3</sup>

Sistem traceability dibentuk pada pertengahan 1930-an di Eropa, yang bertujuan untuk membuktikan keaslian sebuah produk yang bernilai tinggi, salah satu nya adalah sampanye Perancis. Namun seiring dengan perkembangan traceability bukan hanya digunakan untuk melacak asal-usul sebuah produk namun juga digunakan untuk menjamin keamanan dan keperluan kapitalisasi produk seperti branding. Kepentingan traceability terhadap branding ini terlihat dalam tren labelisasi produk salah satunya label organic untuk produk pertanian.<sup>4</sup>

Beberapa negara menerapkan peraturan yang lebih ketat daripada persyaratan minimum WTO dalam masalah traceability. Uni Eropa (UE) telah menjadi yang pertama untuk menempatkan standar traceability minimum menjadi undang-undang, di bawah Peraturan EU EC 178/2002 Pasal 18.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> International Union of Food Science and Technology (IUFoST), Food Traceability, IUFoST Scientific Information Bulletin (SIB), March 2012.

<sup>4</sup> Asian Development Bank Institute, Food Safety and ICT Traceability Systems: Lessons from Japan for Developing Countries, ADBI Working Paper series, May 2009.

<sup>5</sup> Ibid

Traceability diyakini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Selain itu traceability juga sangat penting dalam mendorong produk pertanian lokal untuk penetrasi ke dalam pasar internasional. Namun begitu traceability memerlukan suatu sistem yang masih dianggap rumit dan mahal bagi sebagian besar produsen pertanian di Negara berkembang, dalam hal ini Indonesia. Traceability juga dianggap dapat meningkatkan daya saing produk di pasar internasional, dimana dengan adanya traceability ini produk unggulan suatu daerah akan dapat menghindari “pembajakan produk” oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan atas produk dari suatu tempat. Namun begitu pada faktanya traceability masih belum begitu familiar bagi sebagian besar produsen pertanian dalam negeri. Salah satu hambatan bagi produsen pertanian di Negara berkembang karena usaha pertanian yang masih kecil dan tidak semua petani tergabung dalam kelompok asosiasi atau biasa disebut gapoktan (gabungan kelompok tani) sehingga masih kesulitan untuk melakukan akses terhadap system traceability.<sup>6</sup>

Traceability merupakan salah satu instrument perdagangan internasional dalam pasar bebas dimana berfungsi sebagai salah satu alat pengaman untuk memastikan bahwa fasilitas keuntungan yang ada tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya produk pertanian Negara anggota pasar bebas yang seharusnya mendapatkan fasilitas dibawah perjanjian pasar bebas namun karena tidak didukung oleh dokumen dan persyaratan traceability sehingga akan susah menetrasi pasar dan akhirnya termarginalkan. Contoh lainnya dengan adanya produk assembling maka nilai tambah sebuah produk menjadi semakin banyak dan rumit dari berbagai sumber, sehingga perlu untuk memastikan bahwa produk akhir tersebut memenuhi Nilai Ambang Batas Proses (Sufficient Processing Threshold / SPT) sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian perdagangan bebas.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Asian Development Bank Institute, Food Safety and ICT Traceability Systems: Lessons from Japan for

Persyaratan yang ketat memaksa perusahaan untuk memilih antara memenuhi standar yang ketat dari pasar ekspor utama dan mencari pasar luar negeri lainnya atau dalam negeri yang biasanya kurang kompetitif dan menguntungkan.<sup>8</sup> Dalam pasar yang sangat kompetitif, insiden keamanan pangan dapat merusak nama merek dan bahkan bisnis, dan karena itu pembeli di pasar yang sangat kompetitif, seperti Jepang, cenderung memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk pemasok mereka.<sup>9</sup> Contoh standard terbuka yang mensyaratkan traceability adalah British Retail Consortium Global Standard, International Food Standard, Safe Quality Food 2000 Code, GlobalGAP General Regulations, and ISO 22000:2005.<sup>10</sup>

Sistem traceability memperkuat industri dan mempersiapkan mereka untuk menangani krisis rantai pasokan masa depan atau perubahan dinamika pasar.<sup>11</sup> Sistem traceability dapat memungkinkan untuk komunikasi public secara langsung dengan negara produsen dan negara konsumen.<sup>12</sup> Sistem traceability dapat meningkatkan efisiensi perdagangan secara cepat dan akurat dalam mencatat, merekam, dan melaporkan informasi. Efisiensi ini pada dapat meningkatkan keuntungan serta manfaat bagi industri dalam negeri di negara berkembang dan mitra perdagangan internasional mereka.<sup>13</sup>

### **3. Sertifikat Asal Barang**

Aturan asal barang mengatur pergerakan produk lintas batas dalam hubungan perdagangan internasional. Aturan asal tidak diterapkan pada barang atau produk yang diproduksi dan dijual di dalam negeri itu sendiri.<sup>14</sup> Aturan asal juga mempengaruhi kebijakan dalam investasi dan produksi.<sup>15</sup> Kebijakan dalam

Developing Countries, ADBI Working Paper series, May 2009.

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> International Center for Economic Growth, *Op. Cit.*, p. 1.

<sup>15</sup> Naumann, Eckart., 2005.

produksi meliputi "faktor produksi" dan "pemaksimalan keuntungan perusahaan". Salah satu faktor produksi adalah sumber material barang (bahan mentah). Efisiensi produksi dipengaruhi oleh penggunaan bahan berkualitas baik dengan harga terendah. Faktor ini memicu pembentukan FTA dan PTA antara mitra dagang potensial. Hampir 55% dari perdagangan internasional dalam barang dilakukan di bawah pengaturan preferensial.<sup>16</sup>

Globalisasi menyebabkan kompleksitas dalam penentuan asal barang. Sektor manufaktur global saat ini telah terbukti menciptakan kompleksitas dalam pelaksanaan aturan asal barang.<sup>17</sup> Oleh karena itu, penentuan asal barang merupakan isu penting dalam perdagangan internasional barang karena proses manufaktur terjadi di lebih dari satu negara.<sup>18</sup>

Selain itu perubahan pola produksi yang bersifat multinasional telah menyebabkan fragmentasi, spesialisasi vertikal, atau outsourcing pada proses produksi sebuah produk.<sup>19</sup> Misalnya, munculnya Multinasional Corporation (MNC) atau Transnational Corporation (TNC) yang telah menciptakan kesulitan pada penentuan asal barang sebuah produk. Dalam hal ini produksi MNC atau TNC terjadi di lebih dari satu negara dan menyebabkan fragmentasi produksi. Situasi ini menciptakan kompleksitas dalam pelaksanaan aturan asal barang.<sup>20</sup>

Konsep dasar aturan asal barang adalah untuk mengidentifikasi "kewarganegaraan" dari produk impor/ekspor. Kewarganegaraan sebuah produk akan membawa konsekuensi hukum terhadap instrument kebijakan perdagangan yang akan dikenakan. Untuk menentukan kewarganegaraan sebuah produk diperlukan

pemenuhan syarat teknis dan administrative yang disebut sebagai criteria asal barang.<sup>21</sup>

Berdasarkan sifatnya aturan asal barang digunakan sebagai alat pembenaran untuk menerapkan "kebijakan perdagangan diskriminatif". Oleh karena itu, perlakuan yang diterapkan untuk barang akan berbeda tergantung pada asal barang. Aturan asal barang dibagi menjadi non-preferensial dan preferensial otomatis akan mempengaruhi pengobatan bea cukai untuk barang.<sup>22</sup> Aturan asal barang memiliki nilai ekonomi yang signifikan pada saat barang memasuki pasar. Ketentuan asal barang juga memiliki "implikasi keuangan" dengan harga dan "alokasi sumber daya produktif".<sup>23</sup> Aturan asal mempengaruhi perlakuan pajak dan cukai atas produk. Oleh karena itu, asal barang akan mempengaruhi harga barang ketika bersaing di pasar.

Aturan asal barang yang bersifat preferensi memerlukan dua komponen penting, yaitu "kriteria asal" dan "bukti dokumenter".<sup>24</sup> Bukti dokumenter digunakan sebagai dukungan hukum menyatakan "asal" barang. Sertifikat asal barang yang legal dan otentik dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Berdasarkan dokumen tersebut, petugas bea cukai dapat menentukan jenis instrument kebijakan perdagangan untuk diterapkan pada barang.<sup>25</sup> Namun begitu kedua criteria tersebut tidak boleh menimbulkan hambatan baru dalam perdagangan.

Defleksi perdagangan atau bisa juga disebut kejahatan dalam perdagangan dapat terjadi dalam implementasi aturan asal barang yang bersifat preferensi, ketika produsen dari negara non-penerima preferensi menempatkan barang produksi mereka di negara penerima untuk tujuan memperoleh keuntungan dari instrument kebijakan perdagangan. Negara-negara anggota FTA cenderung untuk menetapkan persyaratan ketat tentang transformasi atas barang. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang

<sup>16</sup> Izam, Miguel, 2003, *Op. Cit.*, p. 13.

<sup>17</sup> Jones, Vivian C., and Martin, Michael F., 2011, *Op. Cit.*, p. 11.

<sup>18</sup> Falvey, Rod and Reed, Geoff., 2000, *Op. Cit.*, p. 14.

<sup>19</sup> Augier, Patricia, Gasior, Michael, and Lai-Tong, Charles., *The Impact of Rules of Origin on Trade Flows*, <http://www.defi-univ.org/IMG/pdf/0301.pdf>, last accessed : 11 February 2011.

<sup>20</sup> Izam, Miguel, 2003, *Op. Cit.*, p. 13. Also the review documents : UN (2001); UN (2002a) and UN (2002b), all of which refer to the most recent contributions of UN/CEFACT on the question of rules of origin.

<sup>21</sup> Stocker, Walter, *Op. Cit.*, p. 2.

<sup>22</sup> International Center for Economic Growth, *Op. Cit.*, p. 1.

<sup>23</sup> Izam, Miguel, 2003, *Op. Cit.*, p. 13.

<sup>24</sup> Stocker, Walter, *Op. Cit.*, p. 4.

<sup>25</sup> International Center for Economic Growth, *Op. Cit.*, p. 1.

berasal dari negara penerima atau negara anggota FTA, sehingga manfaat dari preferensi tersebut benar-benar dinikmati dan dimanfaatkan sesuai tujuannya. Oleh karena itu, untuk mencegah kejahatan dalam perdagangan dibawah skema pasar bebas, ketentuan asal barang yang diperlukan dalam semua preferensi perdagangan.<sup>26</sup>

Namun, peraturan yang terlalu rigid dalam aturan asal barang yang bersifat preferensi telah menyebabkan kesulitan baik secara administratif maupun teknis bagi produsen dari negara anggota FTA sendiri.<sup>27</sup> Aturan asal barang pada dasarnya memiliki sifat diskriminatif karena dapat digunakan sebagai "mekanisme pengecualian" atas pajak umum yang dikenakan.<sup>28</sup> Aturan asal juga memiliki beberapa dampak positif pada bidang hak kekayaan intelektual, seperti indikasi geografis dan keadaan seni.<sup>29</sup>

Perjanjian WTO tentang Ketentuan Asal Barang diadopsi di Marrakech pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian ini terdiri dari empat bagian<sup>30</sup>, sembilan artikel, dan 2 lampiran. Perjanjian WTO tentang Ketentuan Asal menetapkan prinsip-prinsip penting yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota dalam pembentukan peraturan nasional asal barang. Dalam mukadimah perjanjian, disebutkan bahwa negara-negara anggota harus menerapkan prinsip transparansi saat membuat undang-undang, peraturan, dan praktek yang berkaitan dengan aturan asal barang. Prinsip-prinsip ini juga telah diadopsi oleh Pasal 3 Ayat (d) dan (e) dari Perjanjian WTO tentang Ketentuan Asal.<sup>31</sup>

#### 4. Kerjasama Indonesia dalam fasilitasi perdagangan untuk mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan.

Pada dasarnya, Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami kemajuan cukup pesat dalam perdagangan internasional memiliki kebijakan khusus terkait fasilitasi perdagangan. Fasilitasi perdagangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaha promosi produk lokal ke pasar internasional. Pasar internasional merupakan panggung bagi produk Indonesia agar dapat bersaing di pasar internasional. Oleh karena itu, fasilitasi perdagangan menjadi entitas yang tidak terpisahkan dalam usaha mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan.

Carol Cosgrove-Sacks mendefinisikan fasilitasi perdagangan sebagai "*public goods*" yang memberikan seperangkat aturan yang menguntungkan baik bagi sektor pemerintah maupun sektor swasta. Dalam perspektif ekonomi, "*public goods*" didefinisikan sebagai barang yang tidak bisa diperebutkan dan tidak bisa dikecualikan,<sup>32</sup> yang berarti harus bebas dan umum serta dinikmati oleh semua masyarakat. Oleh karena itu, fasilitasi perdagangan harus memberikan manfaat bagi semua pihak. Hal ini disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha, pedagang, para pemangku kepentingan lainnya, pemerintah dan masyarakat umum.<sup>33</sup>

Fasilitasi perdagangan sangat kompleks karena semua unsur-unsurnya saling terkait. Oleh karena itu, perlu suatu sistem yang terintegrasi dan kerjasama yang sinergis antara pihak yang terlibat. Setiap negara harus memastikan bahwa strategi fasilitasi perdagangan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan perdagangan nasional dan regional

<sup>26</sup> Cadot, Olivier., de Melo, Jaime., and Pérez, Alberto Portugal., 2006.

<sup>27</sup> International Center for Economic Growth, *Op. Cit.*, p. 1.

<sup>28</sup> Izam, Miguel, 2003, *Op. Cit.*, p. 13 : UN (2001); UN (2002a) and UN (2002b).

<sup>29</sup> Izam, Miguel, 2003, *Op. Cit.*, p. 12: UN (2001); UN (2002a) and UN (2002b).

<sup>30</sup> Part I (Definitions And Coverage); Part II (Disciplines to Govern the Application of Rules of Origin); Part III (Procedural Arrangements on Notification, Review, Consultation and Dispute Settlement); Part IV (Harmonization of Rules of Origin).

<sup>31</sup> "[...] their laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application relating to preferential rules of origin are published as if they were

subject to, and in accordance with, the provisions of paragraph 1 of Article X of GATT 1994 [...]"

<sup>32</sup> Public good, dapat diakses di at : <http://are.berkeley.edu/courses/EEP101/spring05/Chapter07.pdf>.

<sup>33</sup> Cosgrove-Sacks, Carol and Apostolov, Mario, *Trade Facilitation: The Challenges for Growth and Development*, United Nations Economic Commission for Europe, United Nations New York and Geneva 2003, ECE/TRADE/299, United Nations Publication, Sales N°. E.03.II.E.10, ISBN 92-1-116824-4.

serta pembangunan ekonomi rencana. Pada tingkat regional, fasilitasi perdagangan memberikan keuntungan untuk mempromosikan daya saing dan integrasi pasar. Meningkatkan transparansi dan prosedur yang cepat dianggap sebagai elemen penting untuk membangun kompetensi yang sukses di pasar dunia.<sup>34</sup>

Fasilitasi perdagangan memiliki potensi menyelamatkan miliaran dolar untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dunia. Hal ini memungkinkan liberalisasi perdagangan sebagai alat penting untuk pengembangan ekonomi dunia berdasarkan aturan terprediksi, keterbukaan, dan peniadaan diskriminasi.<sup>35</sup> Carol Cosgrove-Sacks memasukkan aturan terprediksi dan infrastruktur logistik sebagai bagian dari *"public goods"*. Pemerintah dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat ketika *"public goods"* tidak tersedia, yang dalam hal ini adalah fasilitasi perdagangan, berdasarkan aturan yang tersedia.<sup>36</sup>

Tuntutan kepada pemerintah untuk memberikan fasilitasi perdagangan semakin meningkat karena perkembangan pesat di bidang TI yang memiliki pengaruh sangat signifikan. Fasilitasi perdagangan sendiri pada dasarnya selalu menghadapi begitu banyak tantangan. Seperti disebutkan sebelumnya, fasilitasi perdagangan sangat kompleks, karena mencakup berbagai bidang seperti peraturan pemerintah, praktik bisnis, hukum perdagangan internasional, TI dan lain-lain.<sup>37</sup>

Dalam rangka memberikan fasilitasi perdagangan sebagai bagian dari *"public goods"*, kolaborasi sangat dibutuhkan antara sektor swasta dan publik untuk menyepakati tindakan konkrit meliputi komitmen, dan pembayaran. Oleh karena itu, fasilitasi perdagangan akan terwujud sepanjang ada kesediaan semua pihak untuk berkontribusi melampaui biaya yang

dibutuhkan.<sup>38</sup> Namun, menyatukan kepentingan semua pihak menjadi satu visi bukanlah pekerjaan mudah.

Pemerintah negara-negara berkembang menghadapi masalah terkait dengan biaya tambahan sebagai akibat dari penyediaan fasilitasi perdagangan. Di sisi lain, mereka tetap memerlukan fasilitasi perdagangan untuk meningkatkan ekspor. Tuntutan dari masyarakat bisnis juga terus mendorong pemerintah untuk membangun fasilitasi perdagangan. Sebagai contoh Filipina yang mengklaim bahwa pelaksanaan langkah-langkah fasilitasi perdagangan tidak didasarkan pada WTO atau pengaturan perdagangan regional, namun karena tuntutan dari komunitas bisnis.<sup>39</sup>

Seperti disebutkan di sebelumnya, fasilitasi perdagangan harus memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam hal ini, manfaat dari fasilitasi perdagangan tidak hanya terasa bagi pelaku usaha, pedagang, atau pemangku kepentingan namun juga didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi pembangunan. Untuk memastikan tersedianya manfaat bagi semua pihak, perlu ada kemauan politik,<sup>40</sup> pemerintahan yang baik, serta partisipasi sektor swasta. Pasca Lamy menekankan bahwa tekanan politik dari atas ke bawah sangat penting untuk membangun dan menjalankan fasilitasi perdagangan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, kurangnya "kemauan politik" menghambat pelaksanaan fasilitasi perdagangan yang sebenarnya.<sup>41</sup>

## **5. Pemalsuan asal usul barang sebagai bagian dari kejahatan perdagangan internasional (rezim hukum internasional).**

---

<sup>34</sup> Ibid, hal. 15

<sup>35</sup> Ibid, hal. 11

<sup>36</sup> Cosgrove-Sacks, et.al., 2003; Carol Cosgrove-Sacks, *Op. Cit.*, hal. 19.

<sup>37</sup> Ibid, hal. 19

<sup>38</sup> Cosgrove-Sacks, et.al., 2003; Carol Cosgrove-Sacks, *Op. Cit.*, hal. 19-20.

<sup>39</sup> Cosgrove-Sacks, et.al., 2003; Carol Cosgrove-Sacks, *Op. Cit.*, hal. 20.

<sup>40</sup> Alexander Arevalo, also argued that trade facilitation needs "highest-level support", in this point, its interpreted as political will. It is not purely involve government functions, it is also necessary to mobilize private and publicsectors participation and support.

<sup>41</sup> Cosgrove-Sacks, et.al., 2003; Carol Cosgrove-Sacks, *Op. Cit.*, hal. 13-14.



Global Financial Integrity (GFI) pada tahun 2012 memperkirakan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan perdagangan khusus untuk barang sekitar 650 USD. Tindak kejahatan ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Pemalsuan asal usul barang dalam perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian oleh WCO karena menimbulkan kerugian bagi negara penerima preferensi bea fasilitas masuk ke sebuah negara.<sup>42</sup>

Kejahatan perdagangan telah menyebabkan kerugian finansial bagi pemerintah, mengganggu stabilitas ekonomi, dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha, akan tetapi juga di curigai berpotensi besar sebagai sumber pendanaan tindak pidana lainnya seperti terorisme.<sup>43</sup>

Terkait dengan kejahatan perdagangan dalam hal pemalsuan asal usul barang Revisi Konvensi Kyoto pada Lampiran Khusus K memberikan definisi bahwa setiap niat usaha untuk melanggar atau menyalah gunakan asal usul barang dan atau asal usul yang berkaitan dengan dokumen pajak atau bea masuk sebagaimana diatur oleh hukum domestik, perjanjian bilateral atau multilateral negara bersangkutan. Menurut WCO motivasi pemalsuan asal usul barang dalam perdagangan internasional adalah sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Sebagai alat untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas keringanan bea masuk preferensi perdagangan.
2. Untuk menghindari pembatasan kuota atau pelarang impor sebuah produk dari suatu negara.
3. Untuk bisa melakukan penetrasi pasar suatu negara secara ilegal guna mendapatkan keuntungan ekonomi (seperti memalsu asal usul barang untuk membentuk persepsi publik yang lebih baik terhadap suatu produk).

4. Untuk menghindari atau mensiasati pembatasan, sanksi, atau embargo perdagangan.
5. Untuk mengurangi pembatasan kuota dan bea masuk dumping.

Menurut WCO pemalsuan asal usul barang biasa dilakukan melalui beberapa cara :<sup>45</sup>

1. Memalsukan sertifikat asal barang atau bukti dokumen asal usul barang.
2. Menyembunyikan atau mencuci asal usul barang dengan melakukan trans-shipping melalui Negara ketiga.
3. Melakukan perubahan fisik terhadap tampilan produk selama melakukan transshipment yang dapat berupa re-boxing, re-packaging atau re-labeling.
4. Melakukan kombinasi produksi dengan element produk dari suatu negara tertentu guna menutupi asal-usul barang.

ASEAN sebagai salah satu area perdagangan bebas di dunia yang memberikan preferensi tariff terhadap Negara anggotanya sangat rentan terhadap kejahatan perdagangan, salah satu nya adalah pemalsuan asal usul barang. Sebagaimana yang dikemukakan bahwa asal usul barang merupakan salah satu instrument yang digunakan oleh petugas pajak atau pabean untuk memutuskan perlakuan terhadap suatu barang impor seperti pembatasan kuota, preferensi tariff, atau bea masuk anti dumping. Asal usul barang mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi “nasionalitas” produk guna menentukan jenis tarif pajak yang akan dikenakan. Kamar Dagang dan Industri Vietnam menyatakan bahwa kasus pemalsuan sertifikat asal barang yang terjadi di Vietnam mayoritas terjadi pada barang ekspor ke Negara tujuan ekspor utama yang menerapkan persyaratan dan peraturan yang ketat terhadap fasilitas keringanan bea masuk dibawah skema preferensi.<sup>46</sup>

Menurut Kamar Dagang dan Industri Vietnam mengemukakan bahwa selama 3 tahun terakhir selama 2013 terjadi peningkatan pemalsuan sertifikat asal barang yang mencapai

<sup>42</sup> World Custom Organization, *Illicit Trade Report*, 2012.

<sup>43</sup> World Custom Organization, *Illicit Trade Report*, 2012.

<sup>44</sup> World Custom Organization, *Illicit Trade Report*, 2012.

<sup>45</sup> World Custom Organization, *Illicit Trade Report*, 2012.

<sup>46</sup> VietNamNet Bidge, *Origin Certificate Fraud Still Runs Rampant*, 05 Juli 2013.

80 buah. Salah satu bentuk pemalsuan asal usul barang yang terjadi adalah pemalsuan dokumen dengan menggunakan stempel dan tanda tangan palsu otoritas yang berwenang.<sup>47</sup>

#### **6. Dimensi Regional: Instrument Perjanjian Internasional.**

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA/Perjanjian perdagangan barang ASEAN) merupakan evolusi dari Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Agreement (CEPT-AFTA) yang merupakan perangkat hukum Negara-negara ASEAN untuk mengatur perjanjian perdagangan barang. ATIGA disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade In Goods Agreement (Pengesahan Perdagangan Sarang ASEAN). Tujuan penting utama dari AEC adalah mendukung kelancaran arus perdagangan barang, mengurangi hambatan tariff, menekan biaya bisnis yang lebih rendah, peningkatan perdagangan, investasi, dan efisiensi ekonomi dengan tujuan menciptakan sebuah pasar bersama yang besar sehingga mempererat integrasi regional.

ATIGA adalah perjanjian perdagangan barang dibawah rezim AEC yang memuat prinsip-prinsip dalam perdagangan bebas seperti Most Favoured Nations (MFN), National Treatment, prinsip non diskriminasi dan national treatment, pengecualian umum, pengecualian keamanan, safeguard, fair trade dan transparansi. Sebagai salah satu perangkat hukum pada dimensi regional ATIGA memiliki beberapa element yang penting dalam mendukung berfungsi pasar bersama, yaitu liberalisasi tariff, penghilangan hambatan non-tariff, keterangan asal barang, fasilitasi perdagangan, dan bea masuk.<sup>48</sup> Dalam hal ini ATIGA berlaku bagi seluruh produk yang tercakup dalam ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN).<sup>49</sup> Dalam rangka

melindungi negara anggota ASEAN dari perlakuan diskriminasi, dimana negara anggota memberikan tarif yang lebih menguntungkan kepada negara ketiga maka negara anggota ASEAN mempunyai hak untuk meminta negosiasi guna mendapatkan tarif atau perlakuan yang setidaknya sama seperti yang diatur dalam ATIGA. Pemberian konsesi MFN dalam kerangka FTA merupakan hak unilateral dari Negara anggota yang harus diberikan kepada semua negara anggota.<sup>50</sup>

Dalam hal harmonisasi peraturan dari dimensi regional ke dimensi lokal terkait dengan ATIGA diatur dalam pasal 16 ayat 1 ATIGA yang menyatakan bahwa masing-masing Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang patut untuk memastikan pelaksanaan perjanjian ini ditaati oleh pemerintah nasional, lokal, dan otoritas yang ada di wilayah. Delegasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dalam hal ini otonomi daerah, terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini dapat diawasi oleh lembaga non pemerintah yang kompeten.

Dalam ATIGA aturan asal barang dimuat dalam pasal 25 sampai 39, diantaranya mengatur mengenai ketentuan asal barang, kriteria asal, perhitungan kandungan regional, akumulasi, operasional dan pengolahan minimum, pengiriman langsung, de minimis, perlakuan wadah kemasan dan bahan kemasan. Aturan asal barang dalam ATIGA merupakan hasil negosiasi dari negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas perdagangan bebas dibawah kontruksi AEC dapat meningkatkan perdagangan regional.

Tujuan pembentukan pasar bebas akan bisa tercapai apabila fasilitas yang ada dapat diakses dengan mudah dan tepat oleh Negara anggota. Istilah mudah dan tepat ini harus bisa

<sup>47</sup> VietNamNet Bidge, *Origin Certificate Fraud Still Runs Rampant*, 05 Juli 2013.

<sup>48</sup> Trade and facilitation Division ASEAN, *Trade and Facilitation*, <http://www.asean.org/archive/Fact%20Sheet/AEC/AEC-01.pdf>.

<sup>49</sup> Pasal 4 ATIGA. AHTN adalah sistem klasifikasi tarif umum ASEAN. AHTN merupakan inisiatif negara-

negara anggota ASEAN untuk membuat sistem klasifikasi barang yang transparan dan seragam dalam rangka fasilitasi perdagangan berdasarkan Harmonised Commodity Description and Coding System (HS) developed by the World Customs Organisation (WCO), [http://www.aseanaffairs.com/asean\\_news/trade/asean\\_new\\_common\\_tariff\\_codes\\_to\\_be\\_in\\_implemented\\_from\\_2012](http://www.aseanaffairs.com/asean_news/trade/asean_new_common_tariff_codes_to_be_in_implemented_from_2012).

<sup>50</sup> Pasal 5 ATIGA.



diterjemahkan oleh peraturan aturan asal barang dalam ATIGA. Dalam hal mudah, semestinya aturan asal barang dalam ATIGA tidak boleh menciptakan hambatan bagi pasar dengan peraturan yang kaku, kompleks dan birokrasi yang panjang. Oleh karena itu aturan asal barang haruslah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dengan proses pengurusan yang cepat dan sederhana. Istilah tepat, disini bahwa aturan asal harus bisa digunakan sebagai alat untuk memastikan fasilitas perdagangan dapat diakses oleh pelaku usaha dari Negara anggota dan dapat mencegah penyalahgunaan sertifikat asal barang untuk perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini maka aturan asal barang harus memuat ketentuan yang mampu mencegah terjadinya perbuatan tersebut sehingga dapat mencegah atau meminimalisir kerugian yang terjadi.

ATIGA mendefinisikan produksi sebagai metode untuk memperoleh suatu barang termasuk dengan cara menanam, menambang, memanen, mengembangkan, membibit, menyarikan, bertani, mengumpulkan, menangkap, memancing, memasang perangkat, menyatukan, berburu, memfabrikasi, mengolah atau merakit suatu barang.<sup>51</sup> Sedangkan material didefinisikan sebagai setiap benda atau unsur yang digunakan atau dipakai dalam produksi barang atau secara fisik tergabung dalam suatu barang atau ditujukan untuk suatu proses produksi barang lainnya.<sup>52</sup>

Terkait dengan kriteria asal barang, dimana jika barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang yang berasal dari ASEAN maka barang tersebut berhak untuk mendapat fasilitas tariff preferensi dibawah pasar bebas ASEAN.<sup>53</sup> Kriteria asal barang dibagi menjadi dua yaitu produk-produk yang diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di negara anggota dan produk-produk barang yang tidak secara keseluruhan diproduksi atau diperoleh di negara anggota ASEAN.

Pasal 27 ATIGA mengatur mengenai barang yang dikategorikan sebagai produk-

produk yang diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di negara anggota. Kemudian barang yang tidak diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan di negara anggota diatur dalam pasal 28 ATIGA. Barang dikualifikasikan sebagai barang yang tidak diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan di negara anggota apabila barang dimaksud memiliki kandungan nilai regional (kandungan nilai ASEAN atau kandungan nilai regional (Regional Value Content/RVC) tidak kurang dari empat puluh persen dihitung dengan rumus yang sudah ditentukan.

Terkait dengan pengiriman barang secara langsung dari negara anggota pengekspor, maka Pasal 32 ATIGA mengatur bahwa perlakuan tariff preferensi wajib diberikan untuk suatu barang asal yang memenuhi persyaratan dan dikirimkan secara langsung dari wilayah negara anggota pengekspor maupun negara anggota pengimpor. Jika barang melalui satu atau lebih negara anggota, selain negara anggota pengekspor dan negara anggota pengimpor, atau melalui non-negara anggota, maka berlaku persyaratan sebagai berikut :

- a. Persinggahan barang dimaksud hanya berlaku untuk alasan geografis atau pertimbangan terkait persyaratan khusus pengangkutan.
- b. Barang tersebut tidak memasuki wilayah dagang atau dikonsumsi.
- c. Barang tersebut tidak mengalami perubahan atau perlakuan lain kecuali pembongkaran atau pemuatan kembali atau perlakuan untuk menjaga barang dalam keadaan baik.

Pasal yang mengatur pengiriman langsung ini adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan berupa transit fraud dan illegal transshipment, dimana kedua jenis tindakan kejahatan ini akan menggunakan sertifikat asal barang palsu untuk mendapatkan keuntungan dari produk atau barang yang diekspor atau diimpor.

## **7. Dimensi Nasional**

### **1. UU Perdagangan dan Perlindungan Asal Barang**

<sup>51</sup> Pasal 25 paragraf j ATIGA.

<sup>52</sup> Pasal 25 paragraf g ATIGA.

<sup>53</sup> Pasal 26 ATIGA.

Dalam konstruksi pasar bersama ASEAN Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis baik sebagai produsen maupun sebagai pasar. Dengan luas wilayah terbesar, dimana setengah dari total luas wilayah ASEAN, Indonesia diberkati dengan segala kekayaan alam dan kesuburan alam sehingga mempunyai sumber bahan mentah yang melimpah. Namun begitu lambatnya industri hilir terutama dibidang pengolahan menjadikan keunggulan tersebut sebagai kutukan yang harus dibayar dengan biaya ekonomi tinggi terhadap barang jadi atau barang konsumsi. Jumlah populasi yang merupakan sepertiga dari jumlah total populasi ASEAN dengan pertumbuhan yang positif menjadikan pasar Indonesia lucrative bagi negara lain.

Namun begitu selama 69 tahun merdeka, Indonesia baru berhasil mengesahkan Undang-Undang Perdagangan bulan Maret 2014. Selama puluhan tahun produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan yang digunakan warisan hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934* yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tidak secara spesifik mengatur mengenai kejahatan perdagangan terkait dengan pasar bebas. Ketentuan pidananya yang ada dalam undang-undang ini lebih banyak ditunjukan untuk tindak pidana seperti penggelapan, penimbunan, penipuan, dan terkait dengan perlindungan konsumen.

Namun, perlu dicermati beberapa pasal yang dapat digunakan dalam hal mencegah ataupun memberantas kejahatan perdagangan dalam pasar bebas. Pasal 74 memuat tentang pembinaan terhadap pelaku usaha dalam bidang ekspor merupakan salah satu kebijakan yang dapat membantu pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar bagi barang produksi dalam negeri, mencakup kegiatan pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran bagi para pelaku usaha terhadap kejahatan di pasar bebas menjadi penting sehingga perlu juga diberikan bimbingan teknis

dan fasilitasi untuk memberikan pemahaman dan kemampuan untuk dapat mengakses fasilitas pasar bebas. Kerjasama internasional merupakan salah satu instrument yang penting dalam rangka pemberantasan kejahatan perdagangan internasional.<sup>54</sup> Melaksanakan kerjasama perdagangan internasional merupakan salah satu tugas pokok pemerintah pusat.<sup>55</sup> Menurut undang-undang ini bahwa pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR ketika melakukan negosiasi perjanjian perdagangan internasional.<sup>56</sup>

Harmonisasi kebijakan perdagangan mempunyai peranan yang strategis dalam membantu peningkatan fasilitasi perdagangan luar negeri, khususnya terkait dengan prosedur layanan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kebijakan yang overlap dan tidak harmonis menimbulkan hambatan dalam perdagangan seperti birokrasi yang panjang, persyaratan dokumen yang eksekutif, dan berpotensi koruptif. Dalam rangka menghadapi pasar bersama yang menuntut hambatan perdagangan non-tarif untuk di hilangkan atau minimalisir sehingga harmonisasi hukum dan peraturan dari dimensi nasional ke dimensi lokal menjadi urgent.

## **2. Peraturan Menteri tentang Sertifikat asal Barang**

Indonesia sudah mempunyai peraturan asal barang sejak tahun 1970-an. Inpres No 58/1971 mengatur pengangkatan pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat asal. Peraturan sertifikat asal barang telah berubah beberapa kali sejak dibentuk, sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional, terutama untuk sepenuhnya mengintegrasikan diri kedalam sistem perdagangan multilateral. Sertifikat asal barang

<sup>54</sup> Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 : “Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional”.

<sup>55</sup> Pasal 93 paragraf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

<sup>56</sup> Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

harus sesuai dengan praktek dan standar internasional. Kemudian, perluasan pasar produk ekspor Indonesia telah meningkatkan permintaan untuk sertifikat asal barang. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, ini sangat mendesak untuk meningkatkan pelayanan publik terkait dengan penerbitan sertifikat asal. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 / M-DAG / PER / 8/2010, menekankan prinsip efektifitas dan efisiensi pada proses penerbitan sertifikat asal barang melalui pelayanan publik yang sederhana, cepat, tepat, dan transparan.

Praktek perdagangan internasional berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga, pemerintah harus mengadopsi perkembangan teknologi tersebut ke dalam fasilitasi perdagangan. Hal ini membawa implikasi penerapan ICT dalam penerbitan sertifikat asal barang. Pembentukan peraturan asal barang di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum WTO dan instrumen hukum internasional lain diratifikasi oleh Indonesia.

Sertifikat asal barang didefinisikan sebagai dokumen yang menyertai produk ekspor Indonesia yang telah sesuai dengan aturan asal barang untuk memasuki wilayah negara tertentu, dan untuk membuktikan bahwa produk tersebut berasal dari Indonesia. Dengan kata lain, sertifikat asal barang digunakan sebagai dokumen hukum untuk menunjukkan kewarganegaraan dari produk ekspor.<sup>57</sup>

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 / M-DAG / PER / 8/2010 membagi sertifikat asal barang menjadi dua jenis, sertifikat preferensial asal dan sertifikat non-preferensial asal. Menurut peraturan ini, sertifikat asal barang preferensial dikeluarkan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau penghapusan tarif bea masuk dari negara-negara atau kelompok negara terhadap produk ekspor Indonesia yang memenuhi persyaratan perjanjian internasional atau preferensi sepihak. Sementara sertifikat asal barang non-

preferensial dikeluarkan untuk tujuan membuktikan asal negara barang tanpa meminta untuk mendapatkan preferensi tarif.

Seperti disebutkan di atas, aturan asal barang memiliki peran penting dalam pelaksanaan skema preferensi dalam pasar bebas untuk mencegah kejahatan perdagangan. Sertifikat asal barang digunakan untuk memastikan bahwa manfaat dari FTA dinikmati dan dimanfaatkan dengan baik oleh negara-negara penerima untuk meningkatkan perekonomiannya melalui perdagangan. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah Indonesia, mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat asal barang untuk produk ekspor tertentu dan tujuan ekspor tertentu yang membutuhkan sertifikat asal barang.<sup>58</sup> Untuk mendapatkan sertifikat asal barang, eksportir harus mengajukan permohonan kepada lembaga penerbit sertifikat asal barang.<sup>59</sup> Sementara Pasal 7 Ayat 2 mengatur dokumen persyaratan yang perlu disampaikan untuk mendapatkan sertifikat asal barang.<sup>60</sup> Daftar asal lembaga yang menerbitkan sertifikat asal barang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 / M-DAG / PER / 12/2010.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan sertifikat asal, dirancang untuk mencegah kejahatan perdagangan dalam pasar bebas. Sertifikat asal barang digunakan untuk memastikan bahwa manfaat dari perdagangan dapat dinikmati tepat sasaran. Ada lima prinsip penting yang harus diterapkan dalam prosedur penerbitan sertifikat asal barang, termasuk ketepatan, kehati-hatian, transparansi, kesederhanaan, dan kecepatan.

Dua prinsip pertama yaitu, ketepatan dan kehati-hatian diatur dalam Pasal 7 ayat 3, 4 dan 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 / M-DAG / PER / 8/2010, berupa ketentuan pengecekan, pemeriksaan, dan verifikasi dokumen yang diajukan untuk mendapatkan

<sup>57</sup> Pasal 1 paragraf 2 Peraturan Menteri Perdagangan No. 33/M-DAG/PER/8/2010. Pasal 1 paragraf 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 59/M-DAG/PER/12/2010.

<sup>58</sup> Pasal 4 paragraf 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 33/M-DAG/PER/8/2010.

<sup>59</sup> Pasal 5 paragraf 2 Peraturan Menteri Perdagangan No. 33/M-DAG/PER/8/2010.

<sup>60</sup> Pasal 7 paragraf 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 33/M-DAG/PER/8/2010.

sertifikat asal barang. Ayat 3 mewajibkan lembaga yang mengeluarkannya sertifikat asal barang untuk memeriksa setiap permintaan yang diajukan oleh eksportir untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan asal barang.

Prinsip-prinsip transparansi, kemudahan, dan kecepatan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 6 diimplementasikan melalui batas waktu bagi lembaga atau instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat asal barang untuk segera menerbitkan permohonan dimaksud tidak boleh melebihi waktu tertentu setelah semua persyaratan dipenuhi, dikonfirmasi dan diverifikasi. Pemrosesan dokumen maksimum satu hari setelah diterima oleh lembaga penerbit asal barang. Mengenai penolakan penerbitan sertifikat asal barang, maka instansi atau lembaga berwenang yang menerbitkan harus mengeluarkan pemberitahuan tertulis yang berisi alasan penolakan. Hal ini sesuai dengan penerapan prinsip transparansi. Selanjutnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 / M-DAG / PER / 12/2010 mengatur rincian prosedur teknis penerbitan sertifikat asal barang untuk produk ekspor Indonesia.

Dalam rangka untuk memastikan bahwa prosedur penerbitan sertifikat asal barang diterapkan dengan benar, maka diatur sanksi terhadap kemungkinan pelanggaran. Pasal 9 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 / M-DAG / PER / 8/2010 mengatur apabila instansi atau lembaga yang menerbitkan sertifikat asal barang melanggar kewenangan, maka sanksinya adalah pengurangan kewenangan terhadap penerbitan asal barang. Sanksi yang lebih berat adalah pencabutan kewenangan lembaga penerbit sertifikat asal barang. Selanjutnya, Pasal 2 Ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 / M-DAG / PER / 12/2010 mengatur pencabutan kompetensi instansi atau lembaga penerbit sertifikat asal barang.

Daftar lembaga atau instansi yang menerbitkan sertifikat keterangan asal barang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 / M-DAG / PER / 12/2010, kemudian diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 / M-DAG / PER / 4 / 2012. Eksportir

dapat memilih tempat untuk mengajukan permohonan penerbitan SKA pada Instansi Penerbit SKA berdasarkan lokasi atau wilayah kerja Instansi Penerbit SKA.

Lembaga atau instansi penerbit sertifikat barang adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan sertifikat barang. Lembaga atau instansi penerbit sertifikat barang dibagi menjadi dua, yaitu penerbit sertifikat barang untuk komoditas ekspor umum dan penerbit sertifikat barang untuk komoditas ekspor tertentu. Ada delapan puluh lima (85) lembaga dan instansi terdaftar sebagai penerbit sertifikat barang untuk komoditas ekspor umum. Daftar pejabat pemerintah yang mempunyai kewenangan sebagai penandatangan sertifikat asal barang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 26 / M-DAG / KEP / 1/2012.

### **3. Dimensi Lokal (Tingkat Daerah) : Peran Institusi Perdagangan di Daerah dalam perdagangan luar negeri.**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membedakan istilah prinsip dekonsentrasi dan prinsip desentralisasi. Desentralisasi digambarkan sebagai penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Republik Indonesia.<sup>61</sup> Dengan demikian, dekonsentrasi digambarkan sebagai pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau instansi vertikal di daerah tertentu.<sup>62</sup>

Distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang termasuk dalam kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan oleh hukum sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>63</sup> Ada enam urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan

<sup>61</sup> Pasal 1 paragraf 7 Undang-undang No. 32/2004.

<sup>62</sup> Pasal 1 paragraf 8 Undang-undang No. 32/2004.

<sup>63</sup> Pasal 10 paragraf 1 Undang-undang No. 32/2004.

pemerintah pusat, yaitu, urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, judicial, moneter dan fiskal, dan agama.<sup>64</sup> Ada tiga puluh satu urusan pemerintahan yang dibagi di berbagai tingkat pemerintah dan/struktur, di mana urusan perdagangan termasuk dalam kategori ini.<sup>65</sup> Pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kriteria akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan hubungan harmonisasi antara struktur pemerintah untuk menghindari tumpang tindih kompetensi birokrasi.<sup>66</sup> Pelaksanaan distribusi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kota / kabupaten harus didasarkan pada keterkaitan, ketergantungan dan sinergi di bawah satu sistem pemerintahan.<sup>67</sup> Urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi dua kategori, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.<sup>68</sup> Urusan pilihan didefinisikan sebagai urusan pemerintahan yang ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam korespondensi dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan.<sup>69</sup> Sebuah urusan perdagangan termasuk dalam urusan opsional.<sup>70</sup>

Otonomi daerah menciptakan tantangan baru dalam perdagangan luar negeri, seperti harmonisasi hukum dan peraturan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Saat ini, tantangan ini menjadi salah satu perhatian utama dari pemerintah dan komunitas bisnis. Kantor Dagang Indonesia menekankan pentingnya harmonisasi peraturan dan kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat untuk menyediakan lingkungan bisnis yang lebih baik. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan terus melakukan sinergi dengan pemerintah daerah dan mengundang dukungan dari pemerintah daerah untuk berpartisipasi memperkuat

perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional, mengamankan perdagangan dalam negeri, pengembangan infrastruktur distribusi dan sistem perlindungan konsumen. Harmonisasi dan sinergi dari aturan dan peraturan, otonomi daerah tidak boleh menghambat perkembangan ekspor.<sup>71</sup>

Definisi konsep dekonsentrasi di Indonesia adalah delegasi dari beberapa kompetensi pejabat negara di tingkat pemerintah pusat untuk pejabat negara di tingkat lokal.<sup>72</sup> Dari perspektif politik, dekonsentrasi digunakan untuk membawa pemerintah pusat lebih dekat kepada rakyat dengan kontak langsung melalui beberapa pendelegasian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Ini juga digunakan untuk meminimalkan keluhan dan protes dari pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kemudian dari perspektif hukum, dekonsentrasi digunakan untuk mengimplementasikan hukum dan kebijakan pemerintah di tingkat lokal. Secara ekonomi, dekonsentrasi bisa meningkatkan efisiensi birokrasi di mana pejabat pemerintah atau aparat di tingkat daerah secara aktif terlibat dalam perencanaan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.<sup>73</sup>

Dalam rangka melaksanakan dekonsentrasi, diperlukan pedoman, oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 diterbitkan.<sup>74</sup> Peraturan ini dianggap sebagai dasar hukum pelaksanaan dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat lokal dan / atau instansi vertikal di daerah tertentu. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, dengan jelas menyatakan bahwa: "Republik Indonesia dalam melaksanakan administrasi menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan". Ini berarti bahwa dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan sebagai

<sup>64</sup> Pasal 10 paragraf 3 Undang-undang No. 32/2004 jo Pasal 2 paragraf 2 Peraturan Pemerintah No. 38/2007.

<sup>65</sup> Pasal 2 paragraf 4 Peraturan Pemerintah No. 38/2007.

<sup>66</sup> Pasal 11 paragraf 1 Undang-undang No. 32/2004 jo Pasal 4 paragraf 1 Peraturan Pemerintah No. 38/2007.

<sup>67</sup> Pasal 11 paragraf 2 Undang-undang No. 32/2004

<sup>68</sup> Pasal 11, 13, and 14 Undang-undang No. 32/2004 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 38/2007.

<sup>69</sup> Pasal 13 paragraf 2 and Pasal 14 paragraf 2 Undang-undang No. 32/2004 jo Pasal 7 paragraf 3 Peraturan Pemerintah No. 38/2007.

<sup>70</sup> Pasal 7 paragraf 4 Peraturan Pemerintah No. 38/2007.

<sup>71</sup> Butir-Butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 2009-2014.

<sup>72</sup> Nurcholis, 2005 : 24; Hartanti., Erlina, 2010, *Op. Cit.*, hal. 37.

<sup>73</sup> Hartanti., Erlina, 2010, *Loc. Cit.*, hal. 37.

<sup>74</sup> Hartanti., Erlina, 2010, *Op. Cit.*, hal. 39-40.

konsekuensi dari negara kesatuan di mana pemerintah pusat memberikan hak otoritas kecuali untuk beberapa kompetensi yang didelegasikan kepada pemerintah daerah.<sup>75</sup> Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam melakukan urusannya, pemerintah dapat melaksanakan urusan pemerintahan sendiri, mendelegasikan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah (dekonsentrasi) atau menetapkan urusan pemerintah daerah (tugas pembantuan).<sup>76</sup> Secara khusus, Pasal 16 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 mengatur pelaksanaan sistem dekonsentrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 / M-DAG / PER / 12/2011 mendefinisikan dekonsentrasi sebagai pendelegasian kewenangan dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Mengenai dekonsentrasi di sektor perdagangan, Pasal 3 Ayat 1, menyatakan bahwa "pemerintah mendelegasikan beberapa urusan di sektor perdagangan di bawah kompetensi Menteri kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah."<sup>77</sup>

Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan dekonsentrasi pada sektor perdagangan, pemerintah memberikan hak tugas sinkronisasi urusan pemerintah daerah, menerapkan prinsip-prinsip efektif dan efisien dalam dekonsentrasi, dan melakukan tugas koordinasi, manajemen, monitoring, supervisi, dan pelaporan.<sup>78</sup>

Dekonsentrasi pada sektor perdagangan digunakan untuk mendukung pengembangan dan perluasan perdagangan dalam rangka untuk

mempromosikan percepatan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.<sup>79</sup>

Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri di tingkat lokal ditujukan untuk memperluas akses pasar ekspor, dan untuk meningkatkan daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor di pasar global.<sup>80</sup> Perkembangan teknis fasilitasi perdagangan luar negeri di tingkat lokal dilakukan melalui optimalisasi kesempatan yang diberikan oleh perjanjian perdagangan internasional seperti FTA dan / atau preferensi perdagangan unilateral. Ruang lingkup fasilitasi perdagangan luar negeri di tingkat lokal adalah untuk meningkatkan fasilitasi izin ekspor-impor dan fasilitasi non-lisensi. Salah satu program utamanya adalah untuk menyediakan layanan online pada penerbitan sertifikat asal barang dan membangun manajemen elektronik pada pemanfaatan sertifikat asal barang.<sup>81</sup> Hasil yang signifikan dari program dekonsentrasi di fasilitasi perdagangan luar negeri adalah otomatisasi sertifikat asal barang yang dioperasikan secara online di delapan puluh lima (85) instansi di seluruh Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perdagangan dan untuk memastikan pelaksanaan yang tepat dekonsentrasi, maka dilakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga perdagangan lokal dan lembaga yang menerbitkan sertifikat asal barang.<sup>82</sup>

Sehingga penting untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan perdagangan dan

<sup>75</sup> Hartanti., Erlina, 2010, *Op. Cit.*, hal. 44.

<sup>76</sup> Hartanti., Erlina, 2010, *Op. Cit.*, hal. 56.

<sup>77</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 42/M-DAG/PER/12/2011.

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 42/M-DAG/PER/12/2011, <http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2011/12/Permendag%20No.%2042%20Tahun%202011.pdf>, last accessed : 19 June 2012.

<sup>79</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/KEP/1/2011.

<sup>80</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/KEP/1/2011. Pedoman Teknis Dekonsentrasi Perdagangan 2011, *Op. Cit.*, hal. 48.

<sup>81</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/KEP/1/2011. Pedoman Teknis Dekonsentrasi Perdagangan, *Op. Cit.*, hal. 48-49.

<sup>82</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/12/2011, <http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2011/12/Permendag%20No.%2046%20Tahun%202011.pdf>, last accessed : 19 June 2012, hal. 58-61.



mencapai harmonisasi layanan perdagangan.<sup>83</sup> Koordinasi dan pengawasan kebijakan perdagangan luar negeri di tingkat lokal mencakup beberapa kegiatan seperti sosialisasi, evaluasi dan harmonisasi. Kebijakan perdagangan luar negeri terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pelaku usaha, pejabat perdagangan, dan instansi teknis terkait.<sup>84</sup> Pengawasan dan evaluasi kegiatan perdagangan luar negeri di tingkat lokal meliputi kinerja ekspor-impor di tingkat lokal dan pengembangan potensi produk ekspor di pasar dunia.<sup>85</sup>

### KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan dapat dibuat peta "trade governance" yang berupa perangkat hukum yang mengatur perlindungan terhadap produk pertanian dari Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ASEAN. Perangkat hukum ini menjamin traceability produk untuk mendapatkan fasilitas tariff preferensi pasar bebas. Traceability produk dibuktikan dengan sertifikat asal barang yang pengaturan penerbitannya dokumennya merupakan kewenangan pemerintah nasional negara anggota.

Pada dimensi regional traceability produk ekspor negara anggota secara umum diatur dalam rules of origin ATIGA, yang diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade In Goods Agreement (Pengesahan Perdagangan Sarang ASEAN). Sedangkan pada dimensi nasional traceability produk ekspor diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan secara khusus tidak

mengatur mengenai sertifikat asal barang. Namun demikian undang-undang mengatur mengenai harmonisasi hukum nasional yang mana hal ini mempunyai peranan penting dalam fasilitasi perdagangan, khususnya terkait dengan pelayanan penerbitan sertifikat asal barang. Peningkatan kinerja ekspor intra-trade ASEAN akan diiringi dengan naiknya permohonan penerbitan sertifikat asal barang karena dokumen ini merupakan syarat wajib untuk mendapatkan fasilitas tariff FTA. Undang-undang ini mengatur tugas dan kewenangan pusat dan daerah terkait dengan perdagangan luar negeri. Pembagian tugas dan kewenangan ini untuk menghindari peraturan dan kebijakan yang tumpang tindih yang dapat menghambat kinerja ekspor.

Pada dimensi lokal (otonomi daerah), belum ada perangkat hukum yang khusus mengatur perlindungan hukum atas produk ekspor pertanian terhadap kejahatan perdagangan dalam pasar bebas. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi produk pertanian lokal terhadap kejahatan perdagangan di level daerah masih mengalami hambatan terutama terkait dengan koordinasi lintas sektor, salah satunya dalam melakukan verifikasi dokumen dan bukti pendukung untuk menerbitkan sertifikat barang.

### DAFTAR PUSTAKA

Cadot, Olivier., Estevadeordal, Antoni., Eisenmann, Akiko Suwa., and Verdier, Thierry., *The Origin of Goods : Rules of Origin in Regional Trade Agreements*, Oxford University Press Inc., New York, 2006.

Inama, Stefano., *Rules of Origin in International Trade*, Cambridge University Press, New York, USA, 2009.

OECD, *Southeast Asian Economic Outlook 2010*, OECD Publishing, 2010.

Taniguchi, Yasuhei., Yanovich, Alan., and Bahones, Jan., *The WTO in the Twenty-*

<sup>83</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/KEP/1/2011. Pedoman Teknis Perdagangan 2011, *Op. Cit.*, hal. 58.

<sup>84</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/KEP/1/2011. Pedoman Teknis Perdagangan 2011, *Op. Cit.*, hal. 51-52.

<sup>85</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/12/2011, *Op. Cit.*, hal. 56.

- First Century, Disputes Settlement, Negotiations, and Regionalism in Asia*, Cambridge University Press, New York, USA, 2007.
- Cottier, Thomas., and Elsig, Manfred., *Governing the World Trade Organization: Past, present and beyond Doha*, World Trade Forum, Cambridge University Press, New York, USA, 2011.
- E. Diaz-Bonilla, S.E Frandsen and S. Robinson, *WTO Negotiations and Agricultural Trade Liberalization : The Effect of Developed Countries' Policies on Developing Countries*, CAB International, UK, 2006.
- Mavroidis, Petros C., *Trade in Goods : The GATT and the Other Agreements Regulating Trade in Goods*, Oxford University Press Inc., New York, USA, 2007.
- Kerr, William A., and Gaisford, James D., *Handbook on International Trade Policy*, Edward Elgar Publishing, Inc., Massachusetts, USA, 2007.
- Thomas, Chantal., and Trachtman, Joel P., *Developing Countries in the WTO Legal System*, Oxford University Press Inc., New York, USA, 2009.
- Evenett, Simon J., and Hoekman, Bernard M., *Economic Developments & Multilateral Trade Cooperation*, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank and Palgrave Macmillan, Washington D.C, USA, 2006.
- Peter Van de Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organisation: Text, Cases and Materials*, Cambridge University Press, New York, USA, 2005.
- Alam, Shawkat., *Sustainable Development and Free Trade : Institutional Approaches*, Routledge Studies in Development Economics, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, New York, USA, 2008.
- Brown, Colin., *A Short History of Indonesia The Unlikely Nation*, Allen & Unwin, Australia, 2003.
- Andajani, Tatiek K, dan Dwiastuti, Rini, *Pengantar Ekonomi Pertanian : Peranan Pertanian dalam Sistem Perekonomian Indonesia*.
- Jokolelono, Eko, *Pangan dan Ketersediaan Pangan*, Media Litbang Sulteng IV (2) : 88 - 96, Desember 2011.
- Ika, Syahrir, *Kedaulatan Pangan dan Kecukupan Pangan Negara Wajib Mewujudkannya*.
- International Union of Food Science and Technology (IUFoST), *Food Traceability*, IUFoST Scienctetific Information Bulletin (SIB), March 2012.
- Asian Development Bank Institute, *Food Safety and ICT Traceability Systems: Lessons from Japan for Developing Countries*, ADBI Working Paper series, May 2009.
- Commission of the European Communities, *The Rules of Origin in Preferential Trade Arrangements; Orientations for the future*, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee, Brussel, 16.3.2005, COM (2005) 100 final, available at : <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/13420/lcl1945i.pdf>, last accessed : 11 February 2011.
- European Commission, Directorate-General Taxation and Customs Union *Customs Policy, Rules of origin, Green Paper : The Future Of Rules Of Origin In Preferential Trade Arrangements*, A summary report

- of the results of the consultation process, COM(2003)787, final of 18 December 2003, available at : [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/origin\\_consultation\\_final.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/origin_consultation_final.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- Miguel Izam, *Rules of Origin and Trade Facilitation in Preferential Trade Agreement in Latin America*, Serie, Comercio Internacional, Division of International Trade and Integration, Santiago, Chile, August, 2003, available at : <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/13420/lcl1945i.pdf>, last accessed : 22 March 2011.
- Gibbon, Peter, *Rules of Origin and the European Union's Preferential Trade Agreements, With Special Reference to the EU-ACP Economic Partnership Agreements*, DIIS Working Paper no 2008/15, Danish Institute for International Studies, Copenhagen, Denmark, 2008, available at : [http://www.diis.dk/graphics/Publications/WP2008/WP08-15 Rules of Origin and the European Union%92s Preferential\\_Trade\\_Agreements.pdf](http://www.diis.dk/graphics/Publications/WP2008/WP08-15_Rules_of_Origin_and_the_European_Union%92s_Preferential_Trade_Agreements.pdf), last accessed : 11 February 2011.
- Cadot, Olivier., de Melo, Jaime., and Pérez, Alberto Portugal., *Rules of Origin for Preferential Trading Arrangements: Implications for AFTA of EU and US Regimes*, CREA-Institut de macroéconomie appliqué, Université de Lausanne, Juni 2006, available at : <http://www.hec.unil.ch/crea/publications/autrespub/china.pdf>, last accessed : 11 February 2011.
- Jones, Vivian C., and Martin, Michael F., *International Trade: Rules of Origin*, RL34524, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, January 11, 2011, available at : <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34524.pdf>, last accessed : 11 February 2011.
- Augier, Patricia., Gasiolek, Michael., and Lai-Tong, Charles., *The Impact of Rules of Origin on Trade Flows*, available at: <http://www.defi-univ.org/IMG/pdf/0301.pdf>, last accessed : 11 February 2011.
- Dieter, Heribert., *The Multilateral Trading System and Preferential Trade Agreements: Can their Negative Effects be Minimised?*, German Institute for International and Security Affairs, GARNET Working Paper No: 54/08, Berlin, August 2008, available at : [http://www.garnet-eu.org/fileadmin/documents/working\\_papers/5408.pdf](http://www.garnet-eu.org/fileadmin/documents/working_papers/5408.pdf), last accessed : 11 February 2011.
- Harris, Jeremy T, *Rules of Origin for Development: From GSP to Global Free Trade*, IDB, Working Paper Series #IDB WP-135, November 2009, available at : <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1801797>, last accessed : 14 February 2011.
- United Nations Conference on Trade and Development, *Trade Preferences for LDCs: an Early Assessment of Benefits and Possible Improvements*, UNCTAD/ITCD/TSB/2003/8, United Nations, New York and Geneva, 2003, available at : [http://www.unctad.org/en/docs/itcdtsb20038\\_en.pdf](http://www.unctad.org/en/docs/itcdtsb20038_en.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- Falvey., Rod and Reed, Geoff., *Rules of Origin as Commercial Policy Instruments*, Research Paper 2000/18, Centre for Research on Globalisation and Labour Markets, School of Economics, University of

- Nottingham, available at : [http://www.nottingham.ac.uk/shared/shared\\_levepublications/Research\\_Papers/2000/00\\_18.pdf](http://www.nottingham.ac.uk/shared/shared_levepublications/Research_Papers/2000/00_18.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- Stocker, Walter, *WCO Seminar on The Harmonization of Non-Preferential Rules of Origin*, Technical Officer, Origin Sub-Directorate, World Customs Organization, available at : [http://www.dga.gov.do/dgagov.net/uploads/file/seminario\\_regional\\_oma/01rules-of-origin-english.pdf](http://www.dga.gov.do/dgagov.net/uploads/file/seminario_regional_oma/01rules-of-origin-english.pdf), last accessed : 8 March 2011.
- International Center for Economic Growth, Near East Program, *Free Trade Agreements and Rules of Origin*, Policy Brief, Economic Policy Initiative Consortium Project, Brief#0012, available at : [http://www.atdforum.org/IMG/pdf/Policy\\_Brief\\_RoO.pdf](http://www.atdforum.org/IMG/pdf/Policy_Brief_RoO.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- Cheng Xin-xuan, *The Impact of Preferential Rules of Origin on The Relationship of Free Trade Area and The Multilateral Trading System*, available at : <http://www.cscanada.net/index.php/mse/article/viewFile/1614/1884>, last accessed : 9 April 2011.
- Japan External Trade Organization, *ASEAN's FTAs and Rules of Origin*, Overseas Research Departement, available at: [http://www.jetro.go.jp/thailand/e\\_survey/pdf/fta\\_rulesoforigin.pdf](http://www.jetro.go.jp/thailand/e_survey/pdf/fta_rulesoforigin.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- Xinxuan Cheng, *The Development of FTA Rules of Origin Functions*, Asian Social Science Vol. 6, No. 12, December 2010, available at: [www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/download/8426/6254](http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/download/8426/6254), last accessed : 9 April 2011.
- Brenton, Paul., *Notes on Rules of Origin with Implications for Regional Integration on Southeast Asia*, Pacific Economic Cooperation Council, April 22-23, 2003, Washington DC, USA, available at : [http://www.pecc.org/publications/papers/trade-papers/4\\_ROO/2-brenton.pdf](http://www.pecc.org/publications/papers/trade-papers/4_ROO/2-brenton.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- Fink, Carsten., and Nikomborirak, Deunden., *Rules of Origin in Services: A Case Study of Five ASEAN Countries*, WPS4130, World Bank Policy Research Working Paper 4130, February 2007, available at : <http://econ.worldbank.org>, last accessed : 9 April 2011.
- Dordi, C., *Trade defence instruments and globalizations*, Brussels, 11 July 2006, available at : [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/august/tradoc\\_129811.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/august/tradoc_129811.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- Trade Note, *Rules of Origin in Free Trade Agreements*, The World Bank Group, May 29, 2003, available at : <http://www.boaoforum.org/06NewDown/5TradeNote%20on%20Rules%20of%20Origin.pdf>, last accessed : 9 April 2011.
- Jakob, Thinam., and Fiebiger, Gernot., *Preferential Rules of Origin : A Conceptual Outline*, available at : [www.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=280](http://www.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=280), last accessed : 9 April 2011.
- Lazaro, Dorothea C., and Medalla, Erlinda M., *Rules of Origin: Evolving Best Practices for RTAs/FTAs*, Discussion Paper Series No. 2006-01, Philippine Institute for Development Studies, January 2006, available at : [http://www3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdp\\_s0601.pdf](http://www3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdp_s0601.pdf), last accessed : 9 April 2011.

- Estevadeordal, Antoni., Harris, Jeremy., and Suominen, Kati., *Multilateralising Preferential Rules of Origin around the World*, International Working Paper 08, 3rd Quarter 2008, IDB, available at : [http://ctrc.sice.oas.org/geograph/mktac c/Rules\\_of\\_Origin\\_around\\_the\\_World\\_2 008.pdf](http://ctrc.sice.oas.org/geograph/mktac c/Rules_of_Origin_around_the_World_2 008.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- Estevadeordal, Antoni., Harris, Jeremy., and Suominen, Kati., *Multilateralising Preferential Rules of Origin around the World*, IDB Working Paper Series # IDB-WP-137, Inter-American Development Bank, 2009, available at : <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocu ment.aspx?docnum=1803029>, last accessed : 9 April 2011.
- Estevadeordal, Antoni., and Suominen, Kati., *Mapping and Measuring Rules of Origin Around the World*, June 2005, available at : [http://siteresources.worldbank.org/INTR ANETTRADE/Resources/WBI- Training/2884641119888387789/Mappi ng&MeasuringRulesOfOrigin\\_aroundThe World\\_AntoniEstevadeordal&KatiSuomi nen.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTR ANETTRADE/Resources/WBI- Training/2884641119888387789/Mappi ng&MeasuringRulesOfOrigin_aroundThe World_AntoniEstevadeordal&KatiSuomi nen.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- Background Note, *The Agreement on Rules of Origin of the WTO*, June 1998, available at : [http://www.acici.org/aitic/documents/n otes/download/note14\\_eng.pdf](http://www.acici.org/aitic/documents/n otes/download/note14_eng.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- Naumann, Eckart., *Rules of Origin under EPAs: Key Issues and New Directions*, Paper for Tralac Conference October 2005, available at : [http://www.tralac.org/unique/tralac/pdf /20051018\\_ROO\\_paper.pdf](http://www.tralac.org/unique/tralac/pdf /20051018_ROO_paper.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- Rajan Sudesh Ratna, *Rules Of Origin: Diverse Treatment and Future Development In The Asia And Pacific Region*, available at : [http://www.unescap.org/tid/artnet/pub /tipub2469\\_chap3.pdf](http://www.unescap.org/tid/artnet/pub /tipub2469_chap3.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- Australia Customs Service, *Manual : Origin*, Volume 8 B, available at : [http://www.customs.gov.au/webdata/re sources/files/Volume\\_8B\\_\\_Origin1.pdf](http://www.customs.gov.au/webdata/re sources/files/Volume_8B__Origin1.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- A User's Handbook to the Rules of Preferential Origin used in trade between the European Community, other European Countries and the countries participating to the Euro-Mediterranean Partnership, available at : [http://www.customs.gov.au/webdata/re sources/files/Volume\\_8B\\_\\_Origin1.pdf](http://www.customs.gov.au/webdata/re sources/files/Volume_8B__Origin1.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- Comparative Study on Preferential Rules of Origin, available at : [http://www.wcoomd.org/origin/01\\_stud y/01\\_topics.pdf](http://www.wcoomd.org/origin/01_stud y/01_topics.pdf), last accessed : 9 April 2011.
- Cadot, Olivier and de Melo, Jaime., *Why OECD Countries should Reform Rules of Origin*, February 2007, available at : <http://www.cepii.fr/anglaisgraph/comm unications/pdf/2007/190907/cadotS1.pd f>, last accessed : 18 April 2011.
- Naumann, Eckart., *Rules of Origin and EPAs: What has been agreed? What does it mean? What next?*, March 2008, available at : [http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/Nau mann\\_Rules\\_of\\_Origin\\_and\\_EPAs.pdf](http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/Nau mann_Rules_of_Origin_and_EPAs.pdf), last accessed : 18 April 2011.
- Staples, Brian Rankin, *Trade Facilitation*, October 19, 1998, available at : <http://www.acp- eu-trade.org/library/files/Staples%20- %20October%201998%20- %20Trade%20Facilitation.pdf>, last accessed : 18 April 2011.

- Cornejo, Rafael., and Hariss, Jeremy., *Convergent in the Rules of Origin Spaghetti Bowl : A Methodological Proposal*, Working Paper 34, Inter American Development Bank, available at : [http://www.iadb.org/Intal/aplicaciones/uploads/publicaciones/i\\_INTALITD\\_WP\\_34\\_2007\\_CornejoHarris.pdf](http://www.iadb.org/Intal/aplicaciones/uploads/publicaciones/i_INTALITD_WP_34_2007_CornejoHarris.pdf), last accessed : 18 April 2011.
- Dutttagupta, Rupa., and Panagariya, Arvind., *Free Trade Areas and Rules of Origin: Economics and Politics*, IMF Working Paper, 2003, available at : <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03229.pdf>, last accessed : 18 April 2011.
- Medalla, Erlinda M., and Yap, Josef T., *Policy Issues for the ASEAN Economic Community: the Rules of Origin*, Philippine Institute for Development Studies, available at : <http://www.eria.org/research/images/pdf/PDF%20No.1-2/No.1-2-part2-4.pdf>, last accessed : 18 April 2011.
- Grainger, Andrew., *Customs and Trade Facilitation: From Concepts to Implementation*, World Customs Journal, 2007, available at : [http://www.eibd-conference.com/assets/files/TradeFacilitation\\_web.pdf](http://www.eibd-conference.com/assets/files/TradeFacilitation_web.pdf), last accessed : 15 May 2011.
- Christophe Maur, Jean., *Regionalism and Trade Facilitation: A Primer*, Policy Research Working Paper, WPS4464, The World Bank Development Research Group Trade Team January 2008, available at : <http://siteresources.worldbank.org/EXTAFRSubsahtra/Resources/wps4464-Regionalism-Facilitation.pdf>, last accessed : 12 April 2011.
- Zanamwe, Gainmore, *Trade facilitation and the WTO : a critical analysis of proposals on trade facilitation and their implications for African countries*, available at : [http://www.tralac.org/cause\\_data/images/1694/WTO\\_Book\\_Ch8\\_Zanamwe\\_Trade\\_Facilitation\\_MBfin\\_20091116.pdf](http://www.tralac.org/cause_data/images/1694/WTO_Book_Ch8_Zanamwe_Trade_Facilitation_MBfin_20091116.pdf), last accessed : 19 May 2011.